

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus dilaksanakan melalui suatu Perencanaan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek.¹ Kebijakan pembangunan terus dilanjutkan dan ditingkatkan yaitu pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional dan regional yang sehat dan dinamis. Namun dalam keberhasilan pembangunan nasional selama ini masih ditemui beberapa aspek kehidupan masyarakat yang belum banyak tersentuh oleh pembangunan. Diantara aspek kehidupan masyarakat yang belum terselesaikan secara tuntas adalah masalah kemiskinan yang terjadi dimana-mana.²

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai negara termasuk Indonesia sendiri, dan kemiskinan juga merupakan permasalahan yang multidimensional. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, dan perlu dicarikan perspektif yang baru atau yang berbeda untuk melihat, menafsirkan, dan memaknai apa yang dinamakan dengan kemiskinan. Kemiskinan Indonesia yang multidimensional ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik, dan budaya, kemiskinan dalam segala dimensi yang ada baik pendidikan, sejarah, kemiskinan dalam dimensi sosiol-politik (wacana), kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam dimensi perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi).³

¹ Santi R Siahaan, Elvis F Purba, Ridhon MB Simangunsong, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2001), h. 8.

²Santi R Siahaan, Elvis F Purba, Ridhon MB Simangunsong, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2001), h. 8-9.

³ Wardis Girsang, *Kemiskinan Multidimensional Di Pulau-Pulau Kecil*, (Ambon: Badan Penerbit fakultas Pertanian Universitas Pattimura, 2011), h. 1-3.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam menganggap sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Jika kemiskinan ini merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama manusia lainnya, ada beberapa bentuk kezaliman seperti zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, dan zalim kepada dirinya sendiri.⁴

Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, nutrisi, malnutrisi dan kelaparan secara bersamaan yang berakibat kerusakan lingkungan dan munculnya terorisme. Maka dari itu, orang miskin dilarang sakit karena setiap hari harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Penduduk miskin tidak ada kesempatan, akses, termasuk kepercayaan untuk memperoleh bantuan material, teknis dan ketrampilan dari organisasi pemerintah, termasuk lembaga keuangan maupun swasta.⁵

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 27,55 juta jiwa atau 10,19% dari total penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah *Non-Cash Food Assistance Program*. BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia

⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 23-24.

⁵ Wardis Girsang, *Kemiskinan Multidimensional Di Pulau-Pulau Kecil*, (Ambon: Badan Penerbit fakultas Pertanian Universitas Pattimura, 2011), h. 9-10.

diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2020 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.⁶ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000/KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut e-warong. Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.⁷

Program ini diselenggarakan sesuai dengan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Salah satu tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan dan disalurkan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas

⁶ Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: Undang-Undang, 2017), h. 2-5.

⁷ Eko Yudianto Yunus, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigran Kota Probolinggo" dalam *Jurnal Reformasi*, 9 (2): 2088-7469, 2019, h. 138-152.

memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai.⁸

Peraturan menteri tersebut menciptakan sebuah inovasi atau program baru untuk program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan e-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dan RPK (Rumah Pangan Kita) yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.⁹ Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	319.777	11,02
2018	336.820	9,58
2019	356.058	9,11
2020	400.721	12,54
2021	445.384	15,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Mandailing Natal 2022¹⁰

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus

⁸ Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: Undang-Undang, 2017), h. 5.

⁹ Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: Undang-Undang, 2019), h. 2-5.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal 2022.

mengalami peningkatan setiap tahunnya, di tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 319.777 ribu dengan persentase 11,02%, sedangkan di tahun 2021 terus mengalami peningkatan menjadi 445.384 ribu penduduk dengan persentase 15,97%.

Kabupaten Mandailing Natal menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 26.870 Keluarga dari Kementerian Sosial RI. Bantuan pangan berupa non tunai ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait program subsidi beras sejahtera (rastra). “Jika dulu bantuannya dalam bentuk beras langsung yang dikirim oleh bulog, maka sekarang diubah dengan bantuan non tunai agar lebih tertata. Sekarang diberikan melalui rekening dengan nilai bantuan Rp. 110.000 setiap bulannya”. Nilai bantuan tersebut tidak bisa diuangkan, namun ditukar dengan beras atau telur melalui e-warong atau agen yang telah disediakan yang bekerjasama dengan Bank BRI.¹¹

Kelurahan Longat merupakan salah satu desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dan merupakan salah satu desa/kelurahan yang menerima manfaat akan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah yang terhitung sejak tahun 2020 dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 108 KK (Kepala Keluarga) per-tahun 2021. Bantuan pangan Non tunai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdata dan termasuk sebagai nama-nama yang mendapatkan kartu ATM warna merah dengan syarat mengumpulkan fotocopy KK dan Fotocopy KTP, lalu setelah melalui beberapa proses tahapan maka kartu didapatkan dan diambil di kantor Kecamatan Panyabungan Barat. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menerima uang sebesar semula Rp. 110.000 sekarang berubah menjadi Rp.200.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, yang dapat diterima KPM dalam bentuk sembako seperti beras, telur, dll sesuai

¹¹ Ibu Saiyah, Pemilik E-warong Program BPNT di Kelurahan Longat, Wawancara di Kelurahan Longat, Tanggal 15 September 2021.

kebijakan pihak dari e-warung dan kesepakatan dengan masyarakat.¹² Adapun E-warung atau penyalur bantuan BPNT di kelurahan Longat adalah warung kelontong milik bapak reza yang bekerja sama langsung dengan Bank BRI KC Panyabungan.

Berdasarkan hasil informasi *pra survey* peneliti, wawancara mendalam yang dilakukan terhadap masyarakat Kelurahan Longat, dengan pertanyaan “apakah penyaluran sudah tepat sasaran?” Ibu Salmiah yang salah satu responden yang berdomisili di Kelurahan Longat menjawab dalam penyaluran bantuan ini belum tepat sasaran karena masih terdapat KPM yang tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan pemerintah sebagai syarat penerima bantuan dan tergolong masyarakat yang masih mampu.¹³

Kemudian, wawancara juga dilakukan dengan responden lain dengan pertanyaan “apakah jadwal pelaksanaan program ini sudah tepat waktu?” Ibu Nurlela sebagai Masyarakat Kelurahan Longat menjawab masih terdapat ketidakjelasan kapan waktu turunnya akan program bantuan yang menyebabkan beberapa masyarakat yang komplain terhadap pihak E-warung dan diharapkan pemerintah lebih memberi informasi kepada masyarakat tentang hal itu agar masyarakat lebih mendapatkan efek dari program ini sebagaimana tujuan yang ingin dicapai pemerintah dari program ini yaitu mensejahterakan masyarakat miskin melalui pemberdayaan kebutuhan pangan masyarakat.¹⁴

Kemudian, wawancara yang selanjutnya dilakukan dengan responden dengan pertanyaan “bagaimana yang dirasakan ibu dampak dari program ini?” ibu Nurlela selaku KPM menyatakan bahwa sejauh ini program BPNT ini cukup bisa dalam mengurangi pengeluaran untuk bahan makanan, walau

¹² Ibu Saiyah, Pemilik E-warung Program BPNT di Kelurahan Longat, Wawancara di Kelurahan Longat, Tanggal 15 September 2021.

¹³ Salmiah, Warga Kelurahan Longat, Wawancara Di Kelurahan Longat, Tanggal 15 September 2021.

¹⁴Nurlela, Warga Kelurahan Longat, Wawancara Di Kelurahan Longat, Tanggal 15 September 2021.

masih terdapat beberapa KPM yang dirasa belum masuk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM).¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Dampak Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Ekonomi Keluarga Miskin (Studi Kasus Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah yang muncul yaitu:

1. Dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai masih terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
2. Dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai masih terdapat ketidakpastian waktu akan penyaluran bantuan oleh pemerintah.
3. Program BPNT cukup bisa dalam mengurangi pengeluaran keluarga untuk bahan makanan, walau masih terdapat beberapa KPM yang belum masuk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
4. Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia.
5. Dalam perspektif islam kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya berfokus dalam meneliti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal.

¹⁵ Nurlela, Warga Kelurahan Longat, Wawancara Di Kelurahan Longat, Tanggal 15 September 2021.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?”.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis.
2. Bagi universitas/lembaga, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan penulisan dan penelitian karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai.
3. Bagi pemerintah, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan kepada lembaga pemerintah di kelurahan Longat guna menambah evaluasi dan untuk peningkatan program BPNT.
4. Bagi akademisi/peneliti lanjutan, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun sebagai bahan teori untuk penelitian selanjutnya.
5. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya program BPNT terutama bagi KPM.